

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perekonomian masyarakat di Indonesia secara umum masih menghadapi berbagai tantangan yang berdampak langsung pada kesejahteraan sosial, seperti tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antarwilayah¹. Selain itu, keterbatasan lapangan kerja formal yang layak dan tingginya proporsi pekerja sektor informal menyebabkan banyak rumah tangga memiliki pendapatan tidak menentu dan rentan terhadap guncangan ekonomi². Kondisi ini diperparah oleh kenaikan harga kebutuhan pokok yang menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Di sisi lain, lemahnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan di beberapa daerah turut memperlebar kesenjangan kualitas hidup dan kesempatan ekonomi³. Tantangan struktural lainnya juga terlihat pada produktivitas tenaga kerja yang belum merata serta kualitas keterampilan (SDM) yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja⁴.

Dalam sektor pertanian, modernisasi mulai terlihat melalui penggunaan alat mesin pertanian (alsintan), perbaikan sistem irigasi, serta penerapan benih unggul dan teknologi budidaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas⁵. Namun, dampaknya belum sepenuhnya merata karena masih terdapat hambatan

¹ Badan Pusat Statistik (BPS), *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024* (Jakarta: BPS, 2024), 12.

² Badan Pusat Statistik (BPS), *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2023* (Jakarta: BPS, 2023), 25.

³ Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Indonesia 2024* (Jakarta: BPS, 2024), 141.

⁴ Ibid, 141-151.

⁵ Kementerian Pertanian Republik Indonesia, *Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020–2024* (Jakarta: Kementerian Pertanian, 2020), 44.

seperti ketimpangan akses modal dan teknologi, rendahnya keterampilan tenaga kerja, hingga meningkatnya biaya produksi yang tidak selalu diikuti dengan stabilitas harga jual hasil panen. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak cukup hanya melalui pertumbuhan ekonomi dan modernisasi sektor produksi, tetapi juga membutuhkan pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pekerjaan, penguatan perlindungan sosial, serta kebijakan ekonomi yang mampu menjaga daya beli masyarakat secara berkelanjutan⁶.

Meskipun tantangan perekonomian di Indonesia secara umum masih dipengaruhi oleh persoalan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, keterbatasan lapangan kerja formal, serta dominasi sektor informal yang rentan terhadap gejolak ekonomi, dampaknya sering kali lebih kuat dirasakan pada wilayah perdesaan⁷. Hal ini terjadi karena desa masih menjadi ruang hidup bagi sebagian besar masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada sektor primer, terutama pertanian, peternakan, dan usaha kecil, yang sangat bergantung pada kondisi alam serta fluktuasi harga pasar. Selain itu, keterbatasan infrastruktur ekonomi, akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta minimnya peluang kerja non-pertanian membuat kemampuan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan menjadi lebih terbatas dibandingkan wilayah perkotaan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kondisi perekonomian nasional perlu diarahkan lebih spesifik ke konteks perdesaan, guna melihat secara lebih jelas bagaimana

⁶ Badan Pusat Statistik (BPS), *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024* (Jakarta: BPS, 2024), 18.

⁷ Ibid.

tantangan struktural tersebut memengaruhi kehidupan masyarakat desa, termasuk dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, dan keberlanjutan ekonomi lokal⁸.

Tantangan perekonomian di wilayah perdesaan juga terlihat dari tingginya tingkat kemiskinan yang tidak hanya tercermin melalui rendahnya pendapatan, tetapi juga melalui keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, sanitasi, serta infrastruktur jalan yang memadai⁹. BPS mencatat bahwa pada tahun 2023 masih terdapat 39,9% rumah tangga miskin di perdesaan yang belum memiliki akses terhadap sanitasi layak, sehingga memperbesar risiko masalah kesehatan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat¹⁰. Kondisi ini memperkuat ketimpangan pembangunan antara desa dan kota, serta menunjukkan bahwa modernisasi dan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diikuti pemerataan pelayanan publik di wilayah pedesaan¹¹. Dalam situasi tersebut, tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat desa tidak dapat dibebankan sepenuhnya pada individu, melainkan merupakan dampak dari lemahnya tata kelola pembangunan dan belum optimalnya peran pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam menyediakan infrastruktur dasar, memperluas kesempatan kerja lokal, serta memastikan distribusi program pemberdayaan ekonomi berjalan adil dan tepat sasaran¹². Akibatnya, sebagian masyarakat desa memilih mencari alternatif untuk memperbaiki taraf hidup, salah satunya melalui migrasi ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang dianggap

⁸ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, *Laporan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan* (Jakarta: Kemendes PDTT, 2023), 33.

⁹ Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Indonesia 2024*, 141.

¹⁰ Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023* (Jakarta: BPS, 2023), 141.

¹¹ Badan Pusat Statistik (BPS), *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024* (Jakarta: BPS, 2024), 22.

¹² Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, *Laporan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan* (Jakarta: Kemendes PDTT, 2023), 34.

mampu memberikan pendapatan lebih tinggi dibandingkan peluang kerja yang tersedia di desa¹³.

Sebagian besar Pekerja Migran Indonesia (PMI) berasal dari kelompok masyarakat pedesaan dengan latar belakang pendidikan yang relatif rendah, sehingga jenis pekerjaan yang mereka jalani di luar negeri umumnya berada pada sektor informal atau pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus, seperti pekerja rumah tangga, pekerja kebun, buruh konstruksi, maupun pekerja pabrik¹⁴. Kondisi ini menunjukkan bahwa migrasi tenaga kerja bukan semata pilihan individu, melainkan berkaitan erat dengan keterbatasan kesempatan kerja dan tekanan ekonomi di daerah asal, terutama di desa-desa yang masih menghadapi kemiskinan struktural serta ketimpangan pembangunan¹⁵. Rendahnya standar hidup, terbatasnya akses pekerjaan lokal yang layak, menyempitnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan, serta ketidakpastian hasil pertanian karena perubahan iklim mendorong masyarakat mencari sumber penghasilan yang lebih stabil dan menjanjikan. Selain faktor ekonomi, keputusan masyarakat untuk bermigrasi juga dipengaruhi oleh alasan lain seperti adanya jaringan sosial (keluarga atau tetangga yang sudah lebih dulu bekerja di luar negeri), kebutuhan membayar utang atau biaya hidup, keinginan memenuhi biaya pendidikan anak, serta harapan meningkatkan status sosial keluarga melalui kepemilikan aset dan peningkatan konsumsi¹⁶. Dengan demikian, migrasi ke luar negeri menjadi

¹³ Ibid, 34.

¹⁴ Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Pekerja Migran Indonesia 2023* (Jakarta: BPS, 2023), 141.

¹⁵ Badan Pusat Statistik (BPS), *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024*, 24.

¹⁶ International Organization for Migration (IOM), *Labour Migration from Indonesia: An Overview of Indonesian Migration* (Jakarta: IOM, 2020), 27.

strategi bertahan hidup sekaligus upaya mobilitas sosial bagi masyarakat desa yang merasa peluang peningkatan kesejahteraan di wilayah asal masih terbatas.

Pekerja Migran Indonesia, atau PMI, merupakan individu yang memiliki kewarganegaraan Indonesia dan memenuhi kriteria tertentu untuk bekerja di negara lain dalam suatu pekerjaan selama waktu yang ditentukan dengan mendapatkan gaji. Sementara itu, Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja dan berencana untuk bekerja di luar negeri, serta telah terdaftar pada lembaga pemerintah di tingkat kabupaten atau kota yang memiliki otoritas dalam bidang ketenagakerjaan.¹⁷

Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada periode 2019–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam. Pada tahun 2019, jumlah penempatan PMI tercatat sebanyak 276.553 orang, yang terdiri dari sektor formal dan informal, dengan dominasi pada sektor informal. Angka ini menggambarkan kondisi penempatan yang relatif stabil sebelum munculnya pandemi¹⁸. Namun, memasuki tahun 2020, dampak pandemi COVID-19 mulai terasa. Banyak negara tujuan menutup akses bagi pekerja asing, sehingga jumlah PMI menurun drastis menjadi hanya 113.173 orang. Penurunan ini merupakan salah satu yang paling signifikan dalam sejarah penempatan PMI, memperlihatkan betapa rentannya sektor migrasi tenaga kerja terhadap krisis kesehatan global¹⁹. Kondisi semakin memburuk pada 2021, di mana jumlah PMI yang ditempatkan hanya mencapai

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

¹⁸ BP2MI, *Laporan Pengolahan Data Penempatan dan Pelindungan PMI Tahun 2019*. (Jakarta: BP2MI, 2020), 22.

¹⁹ BP2MI, *Laporan Pengolahan Data Penempatan dan Pelindungan PMI Tahun 2020*. (Jakarta: BP2MI, 2021), 24.

72.624 orang. Penurunan ini dipengaruhi oleh pembatasan perjalanan internasional yang masih ketat, lambatnya pemulihan ekonomi negara-negara tujuan, serta adanya penyesuaian kebijakan penempatan tenaga kerja Indonesia.

Meski demikian, tren kembali membaik pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2022, seiring dengan mulai terbukanya kembali negara tujuan penempatan serta adanya adaptasi kebijakan dalam masa transisi menuju normal baru, jumlah PMI melonjak menjadi 200.761 orang. Kenaikan ini menunjukkan pemulihan cepat di sektor penempatan tenaga kerja migran setelah dua tahun mengalami keterpurukan²⁰. Tren positif berlanjut pada tahun 2023, dengan total penempatan PMI meningkat menjadi sekitar 227.000 orang, menandai stabilisasi sektor penempatan setelah fase pemulihan awal. Peningkatan ini tidak hanya dipengaruhi oleh membaiknya kondisi global, tetapi juga oleh tingginya permintaan dari negara-negara Asia Timur seperti Taiwan, Hong Kong, dan Jepang yang kembali membutuhkan tenaga kerja migran. Selanjutnya, pada tahun 2024, jumlah PMI yang ditempatkan meningkat lagi menjadi 236.375 orang, memperlihatkan adanya tren pemulihan yang lebih stabil dan konsisten.

Secara keseluruhan, periode 2019–2024 memperlihatkan dinamika penting dalam mobilitas pekerja migran asal Indonesia. Fluktuasi tajam pada 2020–2021 mencerminkan dampak nyata pandemi terhadap sektor ketenagakerjaan internasional, sedangkan lonjakan pada 2022–2024 menjadi bukti resiliensi dan kemampuan adaptasi PMI serta pemerintah dalam menghadapi krisis. Dengan demikian, data ini bukan hanya mencerminkan angka statistik semata, tetapi juga memberikan gambaran mengenai ketergantungan

²⁰ BP2MI, *Laporan Publikasi Data Penempatan dan Pelindungan PMI Tahun 2022*. (Jakarta: BP2MI, 2023), 29.

ekonomi masyarakat pada sektor migrasi, serta pentingnya dukungan regulasi, perlindungan, dan diversifikasi pasar kerja bagi keberlangsungan penempatan PMI di masa depan.

Masalah pengangguran di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, masih menjadi persoalan serius yang sulit diatasi. Keterbatasan lapangan kerja lokal, rendahnya tingkat pendidikan, serta rendahnya upah di sektor informal menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak. Kondisi ini mendorong banyak warga memilih bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengangguran dan kemiskinan menjadi faktor pendorong utama migrasi tenaga kerja. Studi yang dilakukan di Jawa Tengah mengungkapkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan lapangan kerja, dan tingginya pengangguran di daerah asal merupakan faktor yang signifikan dalam mendorong masyarakat untuk menjadi PMI²¹. Hal serupa juga ditegaskan dalam penelitian lain yang menyoroti bahwa migrasi internasional pekerja migran dari Pulau Jawa dipengaruhi oleh tingkat pengangguran, kemiskinan, serta rendahnya Indeks Pembangunan Manusia²². Bahkan dalam konteks kebijakan lokal, pemerintah Jawa Tengah secara terbuka menyatakan bahwa “*daripada nganggur, warga didorong menjadi PMI,*” yang menunjukkan bahwa pengangguran di tingkat daerah menjadi faktor nyata yang memotivasi migrasi²³. Oleh karena itu, migrasi internasional sebagai PMI tidak

²¹ Ecoducation. *Analisis Determinan Migrasi Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (Studi Kasus di Enam Kabupaten Jawa Tengah)*. (Batam; Universitas Batam, 2023) 45.

²² Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP Unila). *Migrasi Internasional Penduduk Pulau Jawa Menjadi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*. (Universitas Lampung, 2019) 88.

²³ Teropong Jateng. *Daripada Nganggur, Jawa Tengah Dorong Warganya Bekerja di Luar Negeri*. Sumber dari: <https://www.teropongjateng.com/jawa-tengah/61115439109/daripada-nganggur-jawa-tengah-dorong-warganya-bekerja-di-luar-negeri>

hanya dipandang sebagai pilihan individu, melainkan juga sebagai strategi kolektif masyarakat untuk mengatasi keterbatasan ekonomi di daerah asal.

Motif merupakan dorongan dalam diri manusia yang timbul dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia tersebut. Motif berasal dari bahasa latin *movere* yang berarti bergerak atau *to move*²⁴. Keputusan masyarakat untuk menjadi PMI tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga didorong oleh beragam motif sosial, budaya, dan psikologis yang melatarbelakanginya. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung memposisikan migrasi PMI sebagai upaya memenuhi kebutuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup keluarga, sementara dimensi motif sosial yang bersifat subjektif dan simbolik belum banyak mendapat perhatian.

Meskipun bekerja sebagai PMI menawarkan peluang ekonomi yang lebih baik, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, seperti risiko eksploitasi tenaga kerja, kondisi kerja yang sulit, serta dampak psikososial bagi keluarga yang ditinggalkan. Laporan International Labour Organization (ILO) menunjukkan bahwa banyak PMI mengalami berbagai bentuk ketidakadilan, mulai dari upah yang tidak dibayarkan sesuai perjanjian, jam kerja berlebihan, hingga kondisi kerja yang tidak layak²⁵. Ironisnya, meskipun mengetahui adanya risiko dan ketidakadilan tersebut, tekanan ekonomi, keterbatasan pilihan kerja di daerah asal, serta kuatnya dorongan untuk keluar dari kemiskinan tetap mendorong masyarakat memilih jalur migrasi sebagai strategi bertahan hidup²⁶. Dengan demikian, ketidakadilan yang dialami PMI tidak dapat dilepaskan dari motif

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 756.

²⁵ International Labour Organization.(Global Report on Migrant Workers. Geneva: ILO,2023). 23-25.

²⁶ Ibid, 23-25.

migrasi itu sendiri, karena keputusan untuk bekerja ke luar negeri lahir dari situasi ketimpangan struktural dan minimnya alternatif kesejahteraan di dalam negeri. Oleh sebab itu, pemahaman yang mendalam mengenai keterkaitan antara kondisi ketidakadilan, motif migrasi, dan faktor struktural di daerah asal menjadi sangat penting agar pemerintah dapat merumuskan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan PMI yang lebih adil dan berkelanjutan²⁷.

Dampak dari tingginya migrasi tenaga kerja ini juga cukup signifikan, baik secara positif maupun negatif. Dari sisi positif, remitan atau kiriman uang dari para PMI dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga mereka serta mendukung pembangunan ekonomi di desa asal agar dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena peningkatan daya beli masyarakat²⁸.

Namun, dari sisi negatif, migrasi tenaga kerja yang tinggi dapat menyebabkan disrupsi sosial, seperti berkurangnya tenaga kerja produktif di desa, meningkatnya angka perceraian, serta dampak psikologis bagi anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua mereka yang bekerja di luar negeri²⁹. Kurangnya pengawasan dan perlindungan bagi para pekerja migran juga sering kali menjadi permasalahan yang mengakibatkan berbagai bentuk eksploitasi tenaga kerja di luar negeri. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang lebih holistik untuk melindungi hak-hak para pekerja migran serta menciptakan alternatif lapangan pekerjaan di dalam negeri.

²⁷ Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia* (Jakarta: Kemenaker, 2022), 34.

²⁸ Wahyudi, T. *Remitansi dan Dampak Ekonomi Lokal di Indonesia*. (Jakarta: LP3ES, 2022), 48.

²⁹ Sari, D. *Dampak Sosial dan Psikologis Migrasi Tenaga Kerja di Indonesia*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 72.

Dalam memahami keputusan individu untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI), penting untuk melihat tindakan tersebut bukan hanya sebagai respons ekonomi semata, melainkan sebagai tindakan sosial yang sarat makna. Dalam konteks ini, teori tindakan sosial Max Weber menjadi kerangka teoritik yang relevan. Weber membagi tindakan sosial ke dalam empat tipe, yakni tindakan rasional instrumental, tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional. Keputusan menjadi PMI dapat dikategorikan sebagai tindakan rasional instrumental ketika individu mempertimbangkan keuntungan ekonomi, namun juga bisa merupakan tindakan yang berorientasi nilai atau bahkan afektif ketika dipengaruhi oleh harapan keluarga, norma budaya, atau dorongan emosional. Dengan demikian, teori tindakan Weber memungkinkan peneliti melihat bahwa motif migrasi PMI tidak bersifat tunggal dan objektif, tetapi terikat pada makna-makna subjektif yang dimiliki oleh pelaku tindakan itu sendiri. Pendekatan ini membantu mengurai kompleksitas motif di balik migrasi tenaga kerja, yang selama ini lebih sering direduksi ke dalam kerangka ekonomi belaka³⁰.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam motif sosial dan ekonomi masyarakat Desa Salamwates, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek dalam mengambil keputusan untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor pendorong, baik dari aspek ekonomi seperti keterbatasan lapangan kerja dan kebutuhan peningkatan kesejahteraan keluarga, maupun dari

³⁰ Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, (Berkeley: University of California Press, 1978). 4-24.

aspek sosial seperti dorongan lingkungan, status sosial, dan harapan keluarga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa agar tidak bergantung pada migrasi luar negeri semata, serta memberikan masukan bagi peningkatan perlindungan dan kesejahteraan bagi para pekerja migran dan keluarganya.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka fokus masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana motif yang mendorong masyarakat Desa Salamwates, Dongko, Trenggalek untuk memilih bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia?
2. Bagaimana dampak dari keputusan bekerja sebagai PMI terhadap keluarga dan lingkungan sosial masyarakat di Desa Salamwates?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi berbagai motif yang mendorong masyarakat Desa Salamwates, Dongko, Trenggalek menjadi PMI.

2. Untuk mengetahui dampak dari migrasi kerja ke luar negeri terhadap keluarga dan lingkungan sosial di Desa Salamwates.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, memperkaya kajian ilmu sosiologi khususnya dalam teori tindakan sosial dan teori perubahan sosial Max Weber yang diterapkan pada fenomena migrasi tenaga kerja.
2. Secara praktis, memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan perlindungan tenaga kerja migran.
3. Secara sosial, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang berbagai motif dan konsekuensi sosial dari keputusan menjadi PMI, serta mendorong munculnya alternatif usaha ekonomi di desa asal.

E. Penelitian Terdahulu.

Kajian mengenai masyarakat yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah dilakukan oleh banyak peneliti dengan beragam perspektif. Dari sisi ekonomi, penelitian Rahmawati, Ramdani, dan Juniarsih (2023)³¹ menyoroti pentingnya remitansi yang dikirimkan oleh PMI dalam mendukung ekonomi keluarga di daerah asal. Studi yang dilakukan di wilayah pesisir KEK Mandalika tersebut menemukan bahwa dana remitansi tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga dapat diarahkan untuk pembiayaan

³¹ Rahmawati, R., Ramdani, T., & Juniarsih, N. *Pengelolaan Remitansi Keluarga PMI dalam Peningkatan Ekonomi berbasis Komunitas di Wilayah Pesisir KEK Mandalika*. (Jurnal Ilmu Sosial Humaniora, Universitas Pendidikan Ganesha, 2023), 112.

pendidikan anak dan modal usaha produktif. Namun, penelitian ini juga mencatat adanya kendala serius, yaitu rendahnya literasi finansial keluarga penerima remitansi sehingga dana yang diperoleh cenderung habis untuk konsumsi sehari-hari. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun PMI memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga, manfaat jangka panjang dari remitansi akan terbatas jika tidak didukung oleh kemampuan pengelolaan keuangan yang baik. Meskipun memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kontribusi ekonomi remitansi, penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan karena lebih menitikberatkan pada aspek pengelolaan keuangan keluarga pasca migrasi, sehingga belum mengkaji secara mendalam bagaimana proses terbentuknya motif individu dalam mengambil keputusan untuk menjadi PMI, khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan sosial, nilai, serta makna subjektif yang melatarbelakangi tindakan tersebut sebagaimana menjadi fokus dalam penelitian ini.

Dari sisi sosial, penelitian Rohmah dan Sari (2022)³² yang dilakukan di Desa Panggungrejo, Gondanglegi, Malang memberikan bukti bahwa keberadaan anggota keluarga sebagai PMI berdampak nyata terhadap perubahan status sosial dan kesejahteraan keluarga. Penelitian ini memperlihatkan adanya perbaikan kondisi ekonomi rumah tangga, akses pendidikan yang lebih baik, serta peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan. Namun, penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa peningkatan kesejahteraan tidak selalu signifikan, sebab sebagian keluarga tetap mengalami ketergantungan yang tinggi pada remitansi. Kondisi ini menciptakan fenomena “ketergantungan remitansi” yang

³² Rohmah, B. N., & Sari, R. A. P. *Tingkat Perubahan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Buruh Migran di Desa Panggungrejo Gondanglegi Malang*. (Jurnal Intaj, IAI Al-Qolam Malang, 2022), 67.

berpotensi melemahkan inisiatif keluarga dalam membangun usaha lokal di tanah air. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan sisi ganda dari migrasi sebagai PMI: di satu sisi memberikan manfaat ekonomi, tetapi di sisi lain dapat menciptakan kerentanan sosial-ekonomi baru. Meskipun penelitian tersebut berhasil menggambarkan dampak sosial ekonomi migrasi secara cukup rinci, fokus utamanya masih berada pada kondisi pasca migrasi, sehingga belum memberikan perhatian yang memadai terhadap dinamika proses pengambilan keputusan sebelum migrasi terjadi, khususnya terkait dengan motif sosial dan pertimbangan subjektif individu dalam memilih bekerja sebagai PMI, yang menjadi aspek penting dalam penelitian ini.

Dari perspektif faktor pendorong, Arifin dan Anwar (2021)³³ meneliti masyarakat pedesaan di Jawa Timur dan menemukan bahwa keterbatasan lapangan kerja, rendahnya tingkat pendidikan, serta tingginya angka pengangguran menjadi alasan utama yang mendorong masyarakat memilih bekerja sebagai PMI. Penelitian ini sejalan dengan teori migrasi klasik yang menekankan adanya faktor “*push*” (pengangguran, kemiskinan, dan keterbatasan peluang kerja di daerah asal) dan faktor “*pull*” (tingginya upah dan peluang kerja di luar negeri). Hasil penelitian ini menegaskan bahwa keputusan menjadi PMI tidak hanya lahir dari motivasi individu semata, melainkan juga dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan sosial di daerah asal yang masih belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak. Namun demikian, penelitian ini masih berada dalam kerangka analisis yang bersifat makro dan struktural, sehingga belum mampu menjelaskan secara mendalam bagaimana individu

³³ Arifin, A., & Anwar, M, *Faktor Pendorong dan Penarik Masyarakat Bekerja sebagai PMI: Studi di Pedesaan Jawa Timur*. (Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 2021), 145–160.

memaknai keputusan tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka. Dengan kata lain, penelitian ini belum mengkaji dimensi subjektif tindakan sosial, seperti bagaimana individu menimbang pilihan, mempertimbangkan nilai, atau dipengaruhi oleh faktor emosional dan tradisional dalam mengambil keputusan menjadi PMI, yang justru menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Selain itu, Jurnal Ekonomi Pembangunan (2019)³⁴ yang meneliti migrasi internasional penduduk Pulau Jawa menambahkan bahwa tingkat pengangguran, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta tingginya angka kemiskinan di daerah asal berhubungan erat dengan meningkatnya jumlah PMI. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat desa seringkali melihat bekerja di luar negeri sebagai strategi untuk memperbaiki taraf hidup, bukan hanya sekadar mencari penghasilan tambahan. Dalam konteks ini, migrasi PMI dapat dipahami sebagai respons kolektif terhadap ketidakmerataan pembangunan, khususnya di wilayah pedesaan. Dengan demikian, penelitian terdahulu secara umum memperlihatkan bahwa fenomena PMI harus dipahami secara multidimensional: tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari aspek sosial, budaya, dan kebijakan. Hal ini penting agar pemahaman mengenai PMI tidak terjebak dalam perspektif tunggal, melainkan dilihat sebagai fenomena kompleks yang menyangkut dinamika masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Penelitian ini lebih menekankan pada analisis kuantitatif dan hubungan antar variabel makro, sehingga belum mampu menggambarkan secara mendalam pengalaman subjektif individu dalam mengambil keputusan migrasi. Oleh karena itu, penelitian ini belum mengungkap makna tindakan sosial yang melatarbelakangi keputusan

³⁴ Jurnal Ekonomi Pembangunan. *Migrasi Internasional Penduduk Pulau Jawa Menjadi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*. (Universitas Lampung; 2019), 85.

menjadi PMI, terutama dalam konteks lokal yang spesifik seperti yang dikaji dalam penelitian ini.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hidayati,³⁵ dalam *Jurnal Pengembangan Humaniora* lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum bagi tenaga kerja migran asal Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa banyak PMI menghadapi berbagai ancaman, seperti eksploitasi kerja, ketidakjelasan isi kontrak, serta minimnya perlindungan hukum di negara tempat mereka bekerja. Studi ini menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja migran melalui regulasi dan kebijakan yang lebih efektif. Namun demikian, penelitian ini hanya berfokus pada kebijakan dan perlindungan hukum, sehingga belum mengkaji secara mendalam alasan sosial ekonomi individu yang memilih menjadi PMI, serta belum mengaitkan keputusan tersebut dengan perspektif tindakan sosial yang menekankan pemahaman subjektif dari pelaku.

Selain itu, penelitian oleh Widyaningtyas³⁶ dalam *Malaysian Social and Economic Journal*, motivasi masyarakat untuk bekerja sebagai PMI dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti keadaan ekonomi keluarga, pengalaman sosial mereka, serta dampak dari lingkungan sekitar, termasuk hasil yang berhasil dicapai oleh orang lain yang telah bekerja di luar negeri sebelumnya. Penelitian ini juga menemukan bahwa adanya jaringan sosial memiliki peran penting dalam membentuk keputusan seseorang untuk pindah, karena seseorang biasanya mengikuti jejak orang-orang yang dekat dengan dirinya dan dianggap berhasil.

³⁵ Hidayati, N., *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia*, (*Jurnal Pengembangan Humaniora*, no. 3, 2020), 209–210.

³⁶ Widyaningtyas, N. M., “*Motivasi Masyarakat Bali sebagai TKI di Jepang*,”(*Malaysian Social and Economic Journal*; no. 2, 2024): 134–136.

Meskipun penelitian ini telah mulai mempelajari aspek motivasi, pendekatan yang digunakan masih bersifat umum dan belum menjelaskan secara rinci klasifikasi motif berdasarkan jenis tindakan sosial, seperti rasionalitas instrumental, rasionalitas nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional. Oleh karena itu, penelitian ini belum bisa menjelaskan secara lengkap perbedaan pola pikir setiap individu dalam kerangka teori tindakan sosial, yang sebenarnya menjadi pusat perhatian utama dalam penelitian ini.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan penelitian masih memfokuskan pada aspek ekonomi, dampak sosial, faktor struktural, serta kebijakan perlindungan terhadap pekerja migran. Sementara itu, penelitian ini memiliki keunikan dengan mempelajari fenomena PMI dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dengan memfokuskan pada analisis motif sebagai tindakan sosial yang memiliki makna yang bersifat subjektif. Penelitian ini tidak hanya memandang migrasi sebagai akibat dari tekanan ekonomi, tetapi juga sebagai hasil dari cara-cara individu memahami kondisi sosial, nilai budaya, serta pengalaman hidup yang memengaruhi keputusan mereka. Dengan menerapkan teori tindakan sosial Max Weber, penelitian ini mencoba memahami bagaimana seseorang memaknai keputusan mereka untuk bekerja sebagai PMI, sehingga memberikan pemahaman yang lebih dalam dan menyeluruh mengenai fenomena migrasi tenaga kerja di sekitar masyarakat.